



Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan

¹Farid Setiawan, ²Rahmadin Munawwarah, ³Eni Wulandari, ⁴Nur Aini Dewi, ⁵Tramidzi

¹²³⁴⁵Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Ring Road Selatan Tamanan, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

E-mail: _rahmadin1800031167@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Kebijakan lahir bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas keinginan, antarmuka dan tuntutan hidup. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Legitimasi adalah pemberian wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait. Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan antara lain dengan pengesahan, dengan demikian setelah rumusan kebijakan tersebut absah, maka kebijakan tersebut dapat diberlakukan.

Kata Kunci: Legitimasi; Komunikasi; Kebijakan Pendidikan

Abstract

Policy was born at the same time as the population and the complexity of the wants, interfaces and demands of life. The concept of legitimacy is related to people's attitudes towards authority. Legitimacy is the granting of the authority to make and implement decisions as a form of endorsement from the community. In this case, if it is related to the enactment of education policies, the education policy is said to be legitimate or effective after receiving recognition from the public and from related agencies. The form of public recognition of the policy is, among others, ratification, thus after the formulation of the policy is valid, the policy can be enforced.

Key words: Education Policy, Legitimacy, Society.



1. Pendahuluan

Kebijakan atau *Policy* sering diartikan dengan istilah aturan, politik, program, undang-undang, kesepakatan, peraturan, keputusan dan ketentuan yang strategis. Kebijakan adalah peraturan secara tertulis yang merupakan keputusan resmi dari suatu organisasi dan bersifat mengikat. Kebijakan dapat mengatur tingkah laku seseorang dengan tujuan dapat menciptakan tatanan nilai baru dalam suatu masyarakat untuk berperilaku. Kebijakan memiliki sifat proaktif dan problem solving, hal tersebut berbeda dengan peraturan dan hukum. Kebijakan lebih mengatur apa yang boleh sehingga memiliki sifat yang interpretatif dan adaptif. Analisis dari kebijakan sebagai tingkah laku yang digunakan untuk dibuat suatu kebijakan, baik itu suatu kebijakan baru atau kebijakan sebagai konsekuensi kebijakan yang telah ada (Patton dan Savicky dalam Nugroho, 2004:84). Pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan publik. Contohnya pada pelaksanaan kebijakan 5 hari sekolah (Full Day School), kebijakan Ujian Nasional dan kebijakan penetapan Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa kebijakan tersebut merupakan urusan semua pihak atau public bukan urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu.

Kebijakan lahir bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas keinginan, antarmuka dan tuntutan hidup. Perlakuan individu terhadap komunitas tidak dapat terjadi secara terpisah. Dalam rangka melestarikan kecerdasan dan kemajuan hidup, masyarakat membuat aturan yang dibuat oleh para ahli serta suatu penegasan di antara mereka untuk dipatuhi, diaktualisasikan dan dilakukan bersama. Perjalanan hidup manusia yang diawali dengan hadirnya Adam Hawa saat ini telah mencapai lebih dari 2 milyar, yang mungkin merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai “hasil budaya”, salah satunya adalah prinsip-prinsip yang ada. Diaktualisasikan sebagai ajaran untuk mengelola keberadaan suatu organisasi dan persoalannya dengan segenap kebijaksanaan. dan kota (kebijakan). Awalnya pendekatan ini lahir karena diperlukan untuk memberikan latihan pendekatan agar masyarakat dapat terus mewariskan nilai-nilai sosial ke era yang akan datang. Bagaimanapun, dalam hubungannya dengan kebutuhan dan kemajuan yang semakin bergeser yang menimbulkan masalah berbeda dan dengan studi tentang administrasi dan pengaturan yang dipikirkan secara logis. Pengaturan menjadi pilihan sebagai pengaturan yang mengikat warga dan tampaknya menyelesaikan masalah yang kompleks, kunjungan dan umum. Pendidikan dapat merupakan suatu persiapan sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk membentuk cikal bakal dalam menata penerus.

Setelah suatu kebijakan dirumuskan, sebelum diterapkan pada masyarakat harus mendapatkan legitimasi (endorsement) atau kekuatan hukum yang menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Legitimasi sangat penting karena akan berdampak pada masyarakat luas, baik yang bermanfaat bagi sebagian masyarakat maupun yang berdampak merugikan bagi kelompok lain. Selain itu, setiap kebijakan juga berimplikasi pada anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Secara umum, pemerintah atau badan legislatif memiliki kewenangan untuk menjalankan legitimasi. Namun jika ditelisik lebih dalam, proses legitimasi tidak bisa masuk dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi terpenting, karena ukuran legitimasi yang dimiliki pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan dukungan dari pemerintah. Pemerintah dan apa yang ingin didapatnya dari masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini merupakan analisis pustaka dengan tujuan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel terkait, buku-buku, dokumen, dan jurnal yang membahas secara signifikan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu pendidikan legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik Searching, yakni mengambil referensi dari internet dengan tujuan untuk membantu

memperjelas dan agar lebih mudah di telaah dari pada isi makalah tersebut. Temuan dan diskusi selanjutnya setelah dilakukan proses pengumpulan data dan analisis, maka penelitian memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup hasil penelitian ini

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Konsep legitimasi diidentifikasi dengan perspektif individu terhadap kekuasaan. Ini berarti apakah daerah setempat mengakui dan memandang hak perintis untuk membuat dan melaksanakan apa yang mengikat daerah setempat atau tidak. Dalam hal daerah setempat mengakui dan memandang hak perintis untuk membuat dan melaksanakan apa yang mengikat daerah setempat, maka kewenangan itu diatur sebagai otentik atau berlegitimasi. Artinya, keaslian adalah pengakuan dan pengakuan masyarakat atas keistimewaan para pionir, untuk menetapkan dan melaksanakan pilihan politik.

Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa Latin *Lex* yang mengandung arti hukum. Kata legitimasi tidak dapat dipisahkan dari kata-kata seperti keaslian, kehalalan dan kenyataan. Jadi kenyataan yang jelas adalah menunjukkan keserupaan dengan hukum yang berlaku, atau aturan yang ada, apakah aturan formal yang sah, baik, standar atau sosial sudah cukup lama ditetapkan secara sah atau tidak.

Menurut Zimmerman dan Zeitz, legitimasi dapat dilihat sebagai penilaian sosial terhadap penerimaan, kesesuaian, dan atau keinginan. Legitimasi dalam pelayanan publik dapat dimaknai sebagai penerimaan, kesesuaian atau keinginan masyarakat terhadap organisasi. Sedangkan menurut Nor Hadi legitimasi adalah keadaan psikologis keberpihakan orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya berupa fisik maupun non fisik. Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial, sehingga organisasi merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Diindikasikan oleh Silalahi, dikutip oleh Ali Imron, legitimasi berasal dari kata *legitimacy* yang berarti memberi kekuatan atau posisi pada premis aktivitas kerangka politik, termasuk siklus penataan, rekomendasi untuk menangani isu-isu yang muncul di ranah publik. Keaslian juga berasal dari kata keaslian yang menyiratkan siklus tertentu di mana program pemerintah disetujui atau dilegitimasi. Sehingga cenderung terlihat bahwa keaslian mengandung dua implikasi, yaitu pertama yang mengontrol posisi untuk memberikan arahan untuk suatu tindakan, dan orang yang bertanggung jawab atas program yang diusulkan.

Legitimasi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di antara kegiatan perumusan dengan pelaksanaan kebijakan. Sebelum kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilegitimasi. Suatu kebijakan perlu dilegitimasi karena hasil rumusan kebijakan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat ini, pada umumnya dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat. Pengakuan dari masyarakat ini penting sebab ketika kebijakan tersebut dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan kebijakan pendidikan pasti melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan antara lain dengan pengabsahan, dengan demikian setelah rumusan kebijakan tersebut absah, maka kebijakan tersebut dapat diberlakukan. Otorsasi kebijakan pendidikan adalah bentuk lain dari legitimasi, yaitu memberikan kewenangan untuk memberlakukan kebijaksanaan. Dengan kewenangan inilah, mereka yang memiliki kewenangan

untuk melaksanakan program juga akan dimintai pertanggung jawaban atas hasil pelaksanaan kewenangannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi adalah pemberian wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait.

3.2 Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Strategi yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan keaslian dapat dirangkai menjadi tiga, khususnya:

1. Emblematis, khususnya dengan menumbuhkan kepercayaan di mata publik sebagai citra layaknya karakter yang layak, menjaga kualitas sosial dan konvensional. Model; kebaktian kenegaraan, pameran boneka cebol, perayaan acara-acara ketat yang diadakan sekolah, dan lain-lain adalah beberapa contoh pemanfaatan gambar upacara.
2. Prosedural, secara khusus mendorong bantuan material pemerintah kepada individu, seperti pembukaan pekerjaan yang lebih penting, menjamin aksesibilitas makanan yang dibutuhkan oleh individu, kantor pembuatan hortikultura yang menjanjikan, metode korespondensi dan transportasi, modal yang memadai dan sekolah yang lebih baik dan kantor kesejahteraan.
3. Materi, khususnya dengan mengadakan keputusan umum untuk memutuskan agen individu, kepala administrator, presiden, dll. Individu dari yayasan negara bagian atau pengajuan untuk melewati strategi keseluruhan

Menurut Andrain yang dikutip Ramlan Subakti berdasarkan pedoman pengakuan dan bantuan masyarakat kepada badan publik, keaslian dikumpulkan menjadi lima macam, yaitu:

1. Keaslian adat, khususnya daerah setempat memberikan pengakuan dan dukungan kepada para pelopor pemerintahan dengan alasan bahwa yang visioner adalah kerabat dari seorang pionir yang baik yang diterima sebagai penggerak daerah setempat.
2. Keaslian filosofis, khususnya daerah setempat menawarkan bantuan kepada para pelopor pemerintahan dengan alasan para pionir tersebut dipandang sebagai penerjemah dan pelaksana sistem kepercayaan. Filsafat yang tersirat adalah yang bersifat doktrinal, misalnya sosialisme maupun yang praktis seperti radikalisme dan falsafah Pancasila.
3. Keaslian ciri-ciri individu, khususnya daerah setempat memberikan pengakuan dan dukungan kepada otoritas publik karena pelopor memiliki ciri-ciri individual berupa magnet dan penampilan individual serta prestasi gemilang di bidang tertentu.
4. Keaslian prosedural, tepatnya wilayah setempat memberikan pengakuan dan dukungan kepada otoritas publik dengan alasan pelopor memiliki kewenangan sesuai dengan strategi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Keaslian instrumental, tepatnya daerah setempat memberikan pengakuan dan dukungan kepada otoritas publik karena pelopor menjamin atau menjamin bantuan material pemerintah (instrumental) kepada daerah setempat

Dalam hal ini semuanya dipertimbangkan, karena biasanya para pelopor pemerintahan tidak hanya menggunakan satu jenis tetapi juga mengkonsolidasikan setidaknya dua jenis yang ditunjukkan oleh rencana mereka dan tingkat kemajuan masyarakat mereka secara keseluruhan. Untuk sebagian besar, metodologi tertentu membutuhkan penilaian langsung dari orang-orang dan orang-orang terdekat untuk menawarkan bantuan. Bagaimanapun, dengan metodologi terkadang mencari bantuan dari kasual atau tokoh kunci di mata publik. Dengan harapan para tokoh kunci atau tokoh nonformal akan mencari bantuan dari sebagian besar atau penduduk biasa

Tokoh-tokoh kunci atau kasual ini ada di berbagai bidang agama, pekerjaan sosial dan inventif, masalah keuangan, agribisnis, dan yang mengejutkan dalam lingkaran yang terkait dengan uang dan otoritatif. Terlepas dari cara mereka tidak berdiri teguh pada daya tarik apa pun dalam kekuatan terbuka, tokoh-tokoh umum ini umumnya memiliki massa yang sangat besar dan melihat kepercayaan besar pada sosok mereka. Bahkan, dalam kasus tertentu pun, sesuatu yang dimunculkan oleh tokoh kunci tersebut dengan jelas dikenali oleh orang tersebut.

Di negara kita, multi-casting surat suara dipandang seolah-olah semuanya gagal jika pemahaman sudah melewati domain pikiran kreatif. Upaya diselesaikan untuk menjamin bahwa pengaturan dipegang oleh spesialis individu. Jadi, secara tiba-tiba, sebagian besar pertemuan dan minoritas menjadi prioritas utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan ini, misalnya dengan berperang melawan satu sama lain.

Metodologi yang telah ditetapkan dan diikuti secara resmi bukanlah hal yang tidak terbantahkan. Ini benar-benar mempertimbangkan penyegaran, perbaikan dan pembaruan. Selain itu kredibilitas ini dilakukan, meskipun berbeda, untuk memperbaikinya, dengan catatan pada saat selesai tidak ada halangan. Karena dengan kredibilitas ini, masyarakat akan memberikan dukungan karena sesuai dengan keinginan dan asumsi mereka. Kegiatan keaslian mencari bantuan sama seperti memperbaiki prosedur, sedangkan konsekuensi dari kredibilitas adalah menyusun rencana permainan ide yang murah hati dan terakhir.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi suatu kebijakan didapatkan secara simbolis, procedural dan material dengan tipe legitimasi tradisional, ideologi kualitas pribadi, procedural dan instrumental. Dimana proses legitimasi setelah formulasi kebijakan adalah pengajuan penyempurnaan dan legitimasi sebagai keputusan final dari suatu kebijakan

3.3 Problema yang Dihadapi dalam Legitimasi Kebijakan

Ada banyak permasalahan dalam pelaksanaan legitimasi kebijakan pendidikan diantara permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penolakan dari pelaksana rencana sebelumnya yang tidak lagi berkinerja. Ada kecenderungan bahwa rencana awal pelaku memutuskan bahwa apa yang telah dia selidiki, bahkan dilakukan, dapat diakumulasikan ke masa lalu.
2. Adanya hambatan dari pertemuan yang moderat hingga sistem yang dibuat akhir-akhir ini. Apabila permintaan yang diajukan secara point demi point adalah novel, hal itu diidentikkan dengan pendekatan masa lalu yang selama ini dipandang tradisional. Sesuatu yang tradisional umumnya sulit diubah dan jika Anda ingin mengubahnya dalam masyarakat moderat, hal itu membutuhkan usaha.
3. Adanya perlawanan terhadap acara-acara sosial konservatif dan pendekatan masa lalu dari para aktor yang sebelumnya tidak lagi menjadi aktor, sekarang ini sedang digerakkan

sebagai aktor dan sekutu. Umumnya, para pengagum ini juga akan mengikuti sebagian besar peristiwa dan langkah pemimpin mereka. Sejalan dengan itu, asosiasi legitimasi menjadi melemahkan, atau membutuhkan waktu yang lama.

Adanya rintangan untuk memiliki mimpi atau visi, sedikit pengetahuan dan minat yang sebenarnya tidak setara dengan pembuat dan perencana. Tandan resistensi semacam itu sebagian besar sulit untuk diakui. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus berusaha untuk bergerak menuju pertemuan-pertemuan ini sehingga mereka dapat bersama-sama menawarkan bantuan untuk rencana yang telah diatur

Validitas juga dapat menghadapi krisis jika seseorang atau lembaga yang memiliki realitas tidak memiliki (kapasitas) yang memadai untuk menyelesaikan keseluruhan organisasi Negara. Untuk keadaan seperti ini, legitimasi harus dibarengi dengan kapasitas dan kapasitas untuk melaksanakan program-program yang secara lugas diidentikkan dengan individu, sebagai pemegang realitas terbaik, keamanan dan bantuan pemerintah dari orang tersebut menjadi tolak ukur utama dalam menilai. pembatasan keaslian batas pemerintah. . Dengan cara ini mungkin dapat menjadi alasan bahwa kekuatan otentik untuk setiap situasi tidak langsung diidentifikasi dengan kemampuan seseorang.

Realitas krisis terjadi secara umum biasanya terjadi dalam periode yang singkat. Selain itu, perubahan sedang terjadi dari tingkat dan sifat kemajuan ke tingkat dan sifat kemajuan di lingkungan masyarakat berikutnya. Penduduk secara keseluruhan seperti itu cenderung akan menyelidiki setiap posisi yang dipandang tidak mencerminkan penderitaan hidup menurut masyarakat umum.

3.4 Alasan Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide maupun sikap tentang aturan-aturan dalam pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi sangat diperlukan karena memiliki beberapa alasan yaitu:

1. Agar para pelaksana kebijakan pendidikan serta khalayak umum dapat lebih memahami lebih dalam
Penyebab utama tidak diterimanya suatu kebijakan bisa jadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang rumusan kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, kebijakan pendidikan harus terus menerus dikomunikasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami lebih dalam.
2. Agar terhindar dari kesalahpahaman
Kesalahpahaman seringkali menjadi penyebab gagalnya sosialisasi suatu rumusan kebijakan. Komunikasi yang dilakukan secara terus menerus bisa mengoreksi kesalahpahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan

3.5 Problematika Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Terdapat 3 sumber yang menyadi penyebab problema dalam komunikasi kebijakan yaitu:

1. Bersumber dari komunikator

Problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan yaitu :

- a) Komunikator kurang ahli dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan sehingga yang seharusnya pesan-pesan tersebut disampaikan dengan jelas menjadi tidak jelas karena tidak tersampaikan dengan baik.
- b) Perbedaan referensi antara komunikator dan komunikan. Hal ini dapat menyebabkan tidak tepatnya komunikator dalam menyampaikan kebijakan pendidikan.

- c) Kurangnya kredibilitas komunikator dimata komunikan. Kredibilitas komunikator mencakup banyak hal, mulai dari tingkat ketokohnya di masyarakat (di mata komunikan), karakternya dan juga kemampuannya.
2. Bersumber dari pesan itu sendiri

Prolema yang bersumber dari pesan itu sendiri yaitu:

- a) Rumusan kebijakan yang kurang jelas. Rumusan yang tidak jelas akan membuat penerima pesan tersebut juga tidak jelas dalam menangkap pesan.
- b) Rumusan kebijakan yang asing. Rumusan kebijakan yang asing akan memberi peluang penolakan dari masyarakat. Referensi yang telah dimiliki oleh masyarakat menyebabkan terjadinya penolakan terhadap hal-hal yang baru.
- c) Kebijakan yang terlalu ideal dan kurang realistik. Hal ini akan menyebabkan komunikan apatis terhadap pesannya karena hanya dianggap omong kosong yang tidak mungkin dapat dilakukan.
3. Bersumber dari komunikan

Prolema yang bersumber dari komunikan yaitu:

- a) Komunikan yang heterogen. Maksud dari heterogenitas ini yaitu bisajadi dalam hal tingkatan pendidikan, perbedaan etnik, kepercayaan dan agamanya. Heterogenitas ini menyebabkan kesulitan dalam mencari bahasa yang sesuai untuk mereka karena apabila mereka menggunakan bahasa yang tinggi akan sulit dipahami oleh rakyat kebanyakan namun apabila menggunakan bahasa yang rendah akan dianggap tidak berbobot oleh mereka yang tingkatannya tinggi.
- b) Adanya kesalahan dalam penerimaan pesan oleh komunikan yang menyebabkan kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat di simpulkan:

1. Legitimasi adalah pemberian wewenang untuk membuat melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dalam hal ini juga dikaitkan dengan berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait.
2. Legitimasi suatu kebijakan didapatkan secara simbolis, procedural, dan material dengan tipe Legitimasi tradisional, ideology, kualitas pribadi, procedural, dan instrumental. Dimana proses legitimasi setelah formulasi kebijakan adalah pengajuan penyempurnaan dan legitimasi sebagai keputusan final dari suatu kebijakan.
3. Problema yang mungkin dihadapi dalam legitimasi kebijakan adalah adanya resistensi dari eks aktor kebijakan yang kini tidak menjadi aktor lagi, adanya resistensi dari kelompok konservatif atas kebijakan yang baru saja dirumuskan, adanya pengakuan pengikut dari aktor maupun kelompok konservatif yang menghambat, adanya resistensi dari kelompoknya mempunyai visi, persepsi, dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legitimator kebijakan serta terjadinya krisis legitimasi.
4. Terdapat 3 sumber yang menyadi penyebab problema dalam komunikasi kebijakan yaitu Bersumber dari komunikator, Bersumber dari komunikan, Bersumber dari pesan itu sendiri.



Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-578X

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/IPDK/index>

Daftar Pustaka

- Imron, Ali. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Bambang. (2014). *Faktor-faktor yang menjadi Basis Legitimasi dalam Pelayanan Publik dalam Jurnal Transparansi Volume. VI NO. 1 Maret*.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Rusdiana. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Buku Daras: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Arwildayanto dan Arfin Suling. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritik, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia.

